



**Bappeda  
Provinsi Papua**

**2  
0  
2  
1**



**BULETIN**

# Papua Bisa, Papua Sukses!



## PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkenaan-Nya sehingga Buletin Bappeda Provinsi Papua Edisi 3 Tahun 2021 dapat disusun dan diterbitkan. Untuk edisi ini, kami mengusung tema "PAPUA BISA". Alasan pemilihan tema tersebut karena Provinsi Papua telah membuktikan mampu menyelenggarakan 2 (dua) pesta olahraga nasional dengan sukses dan Provinsi Papua pun mampu untuk beradaptasi dengan perubahan paradigma di era digital saat ini.

Kesuksesan perhelatan PON XX Papua 2021 dan PEPARNAS XVI Papua 2021 merupakan bukti utama dalam menggambarkan terwujudnya visi Kebangkitan Papua. Kesuksesan tersebut juga mampu menunjukkan bahwa Provinsi Papua bukan hanya sukses penyelenggaraan, namun juga sukses dalam prestasi olahraga dan hal ini merupakan sejarah baru bagi Provinsi Papua.

Secara khusus, Bappeda Provinsi Papua pun berusaha beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dari sisi kebijakan maupun dari penggunaan berbagai aplikasi yang mendukung tugas, fungsi dan kinerja berbasis bidang-bidang, seperti Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Satu Data Indonesia di Provinsi Papua, Sistem Inovasi Daerah, dan lain-lain.

Kami juga menyadari keterbatasan kami dalam penyusunan buletin ini sehingga berharap adanya saran dan kritik yang membangun. Akhirnya, semoga buletin ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin, red.

## DAFTAR ISI

1	Kepala Bappeda Provinsi Papua : PON XX Papua 2021 Dan PEPARNAS XVI Papua 2021, suatu kebanggaan dan sejarah baru bagi Provinsi Papua
2	Semarak PON XX PAPUA 2021
8	Gegap Gempita PEPARNAS XVI PAPUA 2021 : Papua Juara. Barang Apa Jadi
11	Pelaksanaan Musrengbangda Provinsi Papua 2021 dalam rangka penyusunan RKPD TAHUN 2022
12	Satu Data Indonesia di Provinsi Papua
14	Sistem Inovasi Daerah Landasan Kinerja Pembangunan Berbasis Inovasi
16	INPRES 9 Tahun 2020 : Harapan Baru Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua
18	Pelaksanaan Monitoring
19	Serba-Serbi Kegiatan Bappeda Provinsi Papua 2021

## REDAKSI

### Penanggung Jawab

Yohanes Walilo, S.Sos.,M.Si

### Pimpinan Redaksi

Adolof Kambuaya, SH. M.Si

### Sekretaris Redaksi

Andry, SIP, M.Si

### Redaktur Pelaksana

Drs. Yelela Y. Witipo, M.Si

Dr. Fredy Molle, SE, MM

Verra A.P Wanda, ST, M.Si

Dr. Bintang Yuliana, SE., MM

Merlin Hamadi, SE, MM

Edison Howay, SH., M.Hum

### Peliput Berita

Novita Hana Mramra, SE

Yusran

Mikha Bukorpioper

Syaiful Musaad

### Editor

Zeth F. Waroy, SE

Muh Harrys Usman, S.Kom

Novi Agaki, S.S

### Layout & Desain Buletin

Indra Rukmana, S.Kom

Yanu Misdianto, S.Kom

### Administrasi

Yune Natalia Yonathan, SE

Ellisabeth S. Lumingkewas

Ayu Indriyani, S.KM

Yuliana, Amd.Kep

# KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA: PON XX PAPUA 2021 DAN PEPARNAS XVI PAPUA 2021, SUATU KEBANGGAAN DAN SEJARAH BARU BAGI PROVINSI PAPUA

**Jayapura** - Dipercayakannya Provinsi Papua sebagai tuan rumah pada pelaksanaan PON XX Papua 2021 yang berlangsung pada 2-15 Oktober 2021 dan PEPARNAS XVI Papua 2021 yang berlangsung pada 2-15 November 2021 merupakan bukti bagaimana Provinsi Papua mampu untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan ajang olahraga nasional terbesar di Indonesia ini sehingga dapat terlaksana dengan sukses. Hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan dan sejarah baru bagi Provinsi Papua.

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyatakan bahwa PON XX Papua 2021 dan PEPARNAS XVI Papua 2021 telah terselenggara dengan sukses. Indikator kesuksesan ini tentunya dapat dilihat dari berbagai persiapan yang telah dilakukan jauh hari sebelum terselenggaranya pesta olahraga tersebut. Pemerintah Provinsi Papua berusaha mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan melibatkan berbagai pihak, antara lain beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang dijadikan venue pertandingan. Banyak venue pertandingan dibangun dengan standar nasional bahkan internasional, merenovasi dan meningkatkan beberapa venue pertandingan yang telah ada agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan juga membangun sarana dan prasarana pendukung. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua sangat serius dalam mensukseskan PON XX Papua 2021 dan PEPARNAS XVI Papua 2021.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Papua, tentunya Bappeda Provinsi Papua pun memiliki peran dalam mensukseskan PON XX Papua 2021 dan PEPARNAS XVI Papua 2021. Keterlibatan Bappeda Provinsi Papua dimulai pada saat proses perencanaan, yaitu perencanaan ruang untuk seluruh venue pertandingan, daya tampung orang, daya dukung jalan dan transportasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu, berperan juga dalam menjaga konsistensi anggaran untuk pembiayaan PON XX Papua 2021 dan PEPARNAS XVI Papua 2021. Akhirnya, kami berharap kiranya dengan diselenggarakannya PON XX Papua Tahun 2021 dan PEPARNAS XVI Papua 2021 akan membawa dampak yang baik bagi Provinsi Papua. Bukan hanya untuk nama Pemerintah Provinsi Papua



Kepala Bappeda Provinsi Papua,  
Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si

Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

namun yang terlebih utama adalah dapat berdampak baik bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Selain itu, terselenggaranya PON XX Papua Tahun 2021 dan PEPARNAS XVI Papua 2021 diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mengembangkan potensi olahraga di Provinsi Papua agar kedepannya tumbuh banyak atlet yang berprestasi.

# SEMARAK PON XX PAPUA 2021: PAPUA, TORANG BISA!



**Defile Atlet  
Provinsi Papua**

Foto - PB PON XX PAPUA



Tarian Adat Papua - Foto : PB PON XX PAPUA



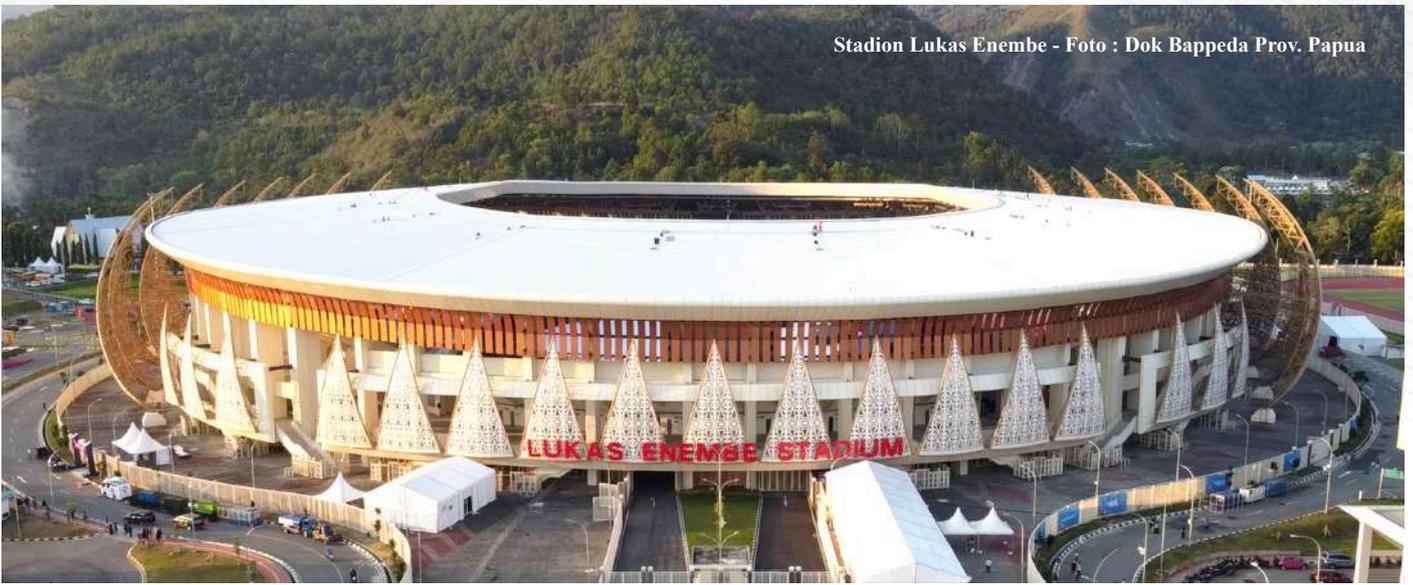
Acara Pembukaan PON XX PAPUA - Foto : PB PON XX PAPUA

**Jayapura** - Provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 untuk pertama kalinya. Pesta Olahraga ini diselenggarakan pada tanggal 2-15 Oktober 2021 dan diikuti oleh 34 Provinsi di Indonesia. Terdapat 37 cabang olahraga dan 56 disiplin pertandingan yang dipertandingkan pada ajang ini dan para atlet kebanggaan Indonesia berlaga untuk memperebutkan medali emas, perak dan perunggu. Berbagai cabang olahraga tersebut diselenggarakan di 4 (empat) klaster pertandingan, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Ada beberapa cabang olahraga mulai dipertandingkan sejak bulan September 2021, antara lain sepak bola, softball, terbang layang, dan futsal.

Untuk Kota Jayapura, cabang olahraga yang dipertandingkan adalah bola voli, voli pantai, tenis,

bulutangkis, sepak bola, binaraga, angkat besi, angkat berat, baseball, softball, sepak takraw, tinju, sepatu roda, karate, taekwondo, selam laut, dayung, paralayang dan layar. Sementara itu, cabang olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Jayapura adalah senam artistik, ritmik, aerobik, loncat indah, polo air, renang artistik, menembak, panahan, sepak bola putri, hoki ruangan, hoki lapangan, kriket, baseball, softball putri, kempo, rugby, pencak silat dan gantole. Kemudian, cabang olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Mimika adalah atletik, basket, billiard, panjang tebing, futsal, bola tangan, sepak bola, judo, tarung derajat, aeromodelling, terbang layang, dan terjun payung. Dan di Kabupaten Merauke, cabang olahraga yang dipertandingkan adalah sepak bola, gulat, wushu, balap motor, anggar, dan catur.

Stadion Lukas Enembe - Foto : Dok Bappeda Prov. Papua



Komplek Stadion Atletik Timika - Foto : PB PON XX PAPUA

Hal yang membanggakan bagi masyarakat Papua adalah Pemerintah Provinsi Papua mampu membangun beberapa venue pertandingan berstandar Internasional, yakni Stadion Lukas Enembe, Gedung Akuatik, GOR Sepatu Roda Buper, Istana Olahraga (Istora) Papua Bangkit, Lapangan Indoor dan Outdoor Hockey, Arena Dayung dan Lapangan Kriket. Venue-venue tersebut tersebar di 4 (empat) klaster. Untuk Kota Jayapura terdapat venue pertandingan, yaitu GOR Sepatu Roda Buper, Dayung, GOR Koya Koso, Lapangan Voli Pantai Koya Koso, Lapangan Tennis Wali Kota Jayapura, GOR Waringin, Lapangan Bola Mahacandra Uncen, Auditorium Universitas Cenderawasih, Lapangan Softball Universitas Cenderawasih. Untuk Kabupaten Jayapura terdapat

venue pertandingan, yaitu Istana Olahraga (Istora) Papua Bangkit, Gedung Akuatik, Lapangan Indoor dan Outdoor Hockey, Lapangan Kriket dan Arena Panahan Kompleks Kingmi Kampung Harapan, Stadion Barnabas Youwe, Lapangan bisbol dan Softbol TNI Angkatan Udara, Lapangan Menembak Outdoor TNI Angkatan Udara, GOR STT Gidi Sentani, Lapangan Rugby TNI Angkatan Udara, GOR Habel Melkias Suwae dan Lapangan Advent Doyo Baru, Lapangan Menembak Indoor, Lapangan Menembak Outdoor TNI AU. Untuk Kabupaten Mimika terdapat venue pertandingan, yaitu Stadion Atletik Mimika Sport Center, GOR Basket Mimika Sport Center, GOR Billiar SP-3 Mimika, Arena Panjat Tebing Mimika, Lapangan Sepak Bola SP1 dan SP5 Mimika GOR Emeneme Joware, Pangkalan

Udara TNI Angkatan Udara dan Lapangan Kantor Bupati Mimika. Untuk Kabupaten Merauke terdapat venue pertandingan, yaitu Stadion Katalpal, GOR Futsal Koni, Arena Balap Motor Tanah Miring, Archelaus Sai dan Hotel Swiss Bell (Ballroom).

Pembukaan PON XX Papua 2021 dilaksanakan, Sabtu (2/10) malam di Stadion Lukas Enembe Kampung Harapan, Kab Jayapura. Kemeriahan Pembukaan PON XX Papua 2021 dapat dilihat dari tingginya antusias masyarakat untuk melihat secara langsung acara tersebut di stadion bertaraf internasional terbaik se-Asia Pasifik ini. Stadion Lukas Enembe berkapasitas 40.000 orang dan terletak pada kawasan seluas 13,7 hektar.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI), Marciano Norman, melaporkan bahwa PON XX Papua 2021 yang diikuti 34 kontingen dari 34 KONI Provinsi, 6116 atlet tamu dan 923 atlet tuan rumah Papua, mempertandingkan 37 cabang olahraga, yang terdiri dari 56 disiplin olahraga dan 681 nomor pertandingan. Dalam ajang olahraga ini memperebutkan 681 medali emas, 681 medali perak, dan 877 medali perunggu. Penyelenggaraan tersebar di 4 klaster, yaitu, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Venue yang digunakan sebanyak 45 venue berstandar nasional bahkan sebagian diantaranya berstandar internasional. Dilaporkan bahwa beberapa pertandingan sudah dimulai,

Rabu (22/09/21) dengan klasemen sementara perolehan medali sampai dengan sebelum pembukaan, yaitu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 28 medali emas, Provinsi Papua sebanyak 17 medali emas, dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 11 medali emas. Dalam laporannya, Norman berharap agar PON XX Papua 2021 ini tidak hanya sukses dalam hal prestasi namun juga sukses dalam penyelenggaraan administrasi, ekonomi, dan pasca PON. "Ajang ini juga untuk meningkatkan silaturahmi, saling berlagu namun tetap mengedepankan sportifitas, rasa persaudaraan, serta sebagai alat pemersatu bangsa", ujar Norman.

Sambutan selamat datang kepada semua kontingen dari Provinsi lain dan juga para tamu undangan disampaikan langsung

oleh Gubernur Papua sekaligus Ketua Umum Panitia Besar PON XX Papua 2021, Lukas Enembe. "Masyarakat Papua sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Republik Indonesia. Merah Putih akan selalu terjahit rapi dalam hati dan jiwa masyarakat. Selamat datang kepada seluruh kontingen dan pihak-pihak pendukung lainnya", ujar Enembe. Lebih jauh, Enembe mengatakan "Tangan kami terbuka lebar untuk menyambut sahabat-sahabat semua dan hati kami juga diselimuti oleh kasih untuk menemani setiap detik sahabat semua di Tanah Papua". Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara resmi membuka PON XX Papua 2021.

"Pekan Olahraga ini menggambarkan kesiapan Papua, kemajuan infrastruktur di Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional & internasional. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan dan PON adalah panggung kesetaraan & keadilan untuk maju bersama dan sejahtera bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Presiden Republik Indonesia,  
**Ir. H. Joko Widodo**

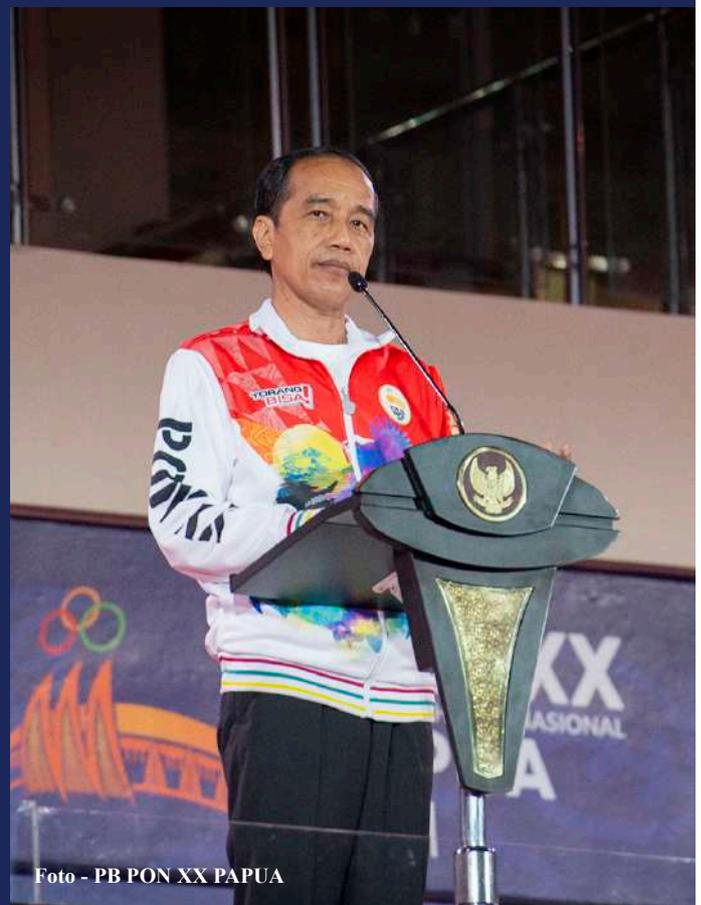


Foto - PB PON XX PAPUA



Foto : PB PON XX PAPUA

## Para mantan atlet asal Papua yang pernah meraih prestasi nasional & internasional

Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Duta Besar negara-negara sahabat (hadir secara virtual), Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia hadir dalam acara pembukaan tersebut. Selain itu, hadir pula para atlet perwakilan dari kontingen-kontingen yang ikut serta dalam PON XX Papua 2021. Bendera PON dibawakan oleh 8 (delapan) atlet legendaris Papua, yaitu Raema Lisa Rumbewas (angkat besi), Benny Maniani (tinju), Erni Sokoy (dayung), Novilus Yoku (karate), Kartika Monim (voli), Melly Mofu (atletik lari gawang), Rully Rudolf Nere (sepak bola), dan Imanuel Daundi (pencak silat). Suasana haru begitu dirasakan ketika Presiden berkenan turut bermain bola bersama salah satu pemain bola kebanggaan Persipura Jayapura, Jack Komboy dan juga beberapa pemain bola lainnya. Setelah sejenak bermain bola, Presiden kemudian memukul tifa dan pembawa obor PON XX Papua 2021, Boaz Solossa menyalakan api pada tungku yang menandakan dimulainya PON XX Papua 2021. Acara pembukaan ini dimeriahkan dengan penampilan dari artis nasional, artis lokal Papua, dan grup tarian lokal Papua serta semarak kembang api.

Pelaksanaan PON XX Papua 2021 dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 sehingga protokol kesehatan diterapkan di semua venue pertandingan. Aturan terkait pelaksanaan protokol kesehatan ini berlaku bagi semua orang yang terlibat di setiap venue pertandingan dan juga bagi penonton. Hal ini dapat dilihat dari disediakan tempat untuk

mencuci tangan, disediakan handsanitizer di semua pintu masuk venue pertandingan, setiap orang yang berada di lokasi venue pertandingan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak, setiap penonton wajib menunjukkan sertifikat vaksin saat hendak menonton pertandingan, dan kapasitas kursi penonton dibatasi sehingga jarak duduk antar penonton tetap terjaga. Walaupun penerapan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, namun tidak mengurangi antusias masyarakat untuk datang menonton dan memberikan semangat serta dukungan pada atlet atau tim yang didukungnya. Selain penerapan protokol kesehatan, pihak keamanan juga dilibatkan untuk menjaga keamanan selama berlangsungnya pertandingan pada setiap venue pertandingan.

Ajang pesta olahraga ini digunakan juga untuk memperkenalkan berbagai produk lokal Papua. Hal ini dapat dilihat dari disediakan tempat untuk UMKM lokal Papua memamerkan dan menjual produknya, seperti souvenir maskot PON XX Papua 2021, kaos berdesain Papua, berbagai minuman (terutama kopi khas Papua), makanan berbahan dasar sagu, ikan dan sebagainya, noken, ukiran dan berbagai kerajinan tangan lainnya khas Papua. Selain itu, upaya untuk memperkenalkan kearifan lokal Papua juga dilakukan dengan menggelar berbagai festival budaya dan juga festival kopi khas Papua. Antusiasme pengunjung pada berbagai gelaran festival tersebut sangat baik.

Provinsi Papua berhasil memperoleh 261 medali, yang terdiri dari 93 medali emas, 66 medali perak, dan 102 medali perunggu. Perolehan medali ini menempatkan Provinsi Papua pada urutan keempat perolehan medali terbanyak pada ajang PON kali ini. Adapun 5 (lima) cabang olahraga yang paling banyak menyumbangkan medali bagi Provinsi Papua, yaitu menembak sebanyak 24 medali, sepatu roda sebanyak 15 medali, muaythai sebanyak 13 medali, bermotor sebanyak 9 medali, dan selam sebanyak 7 medali. Prestasi ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi seluruh masyarakat Papua karena selain sukses sebagai tuan rumah PON XX Papua 2021, Provinsi Papua juga membuktikan bahwa para atlet yang dimilikinya mampu berprestasi di kancah olahraga nasional. Selanjutnya, puncak klasemen perolehan medali terbanyak dan sekaligus sebagai juara umum adalah Provinsi Jawa Barat

dengan perolehan sebanyak 353 medali. Kemudian diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta pada peringkat kedua dengan perolehan sebanyak 301 medali dan peringkat ketiga diraih oleh Provinsi Jawa Timur dengan perolehan sebanyak 287 medali.

Ranking	Kontingen	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	 Jawa Barat	133	105	115	353
2	 DKI Jakarta	111	91	99	301
3	 Jawa Timur	110	89	88	287
4	 PAPAN	93	66	102	261
5	 Bali	28	25	53	106

Perolehan Medali 5 besar pada ajang PON XX 2021



Wakil Presiden Republik Indonesia,  
Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin

Foto - PB PON XX PAPAN

Harapan Kabupaten Jayapura dan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menyatakan rasa bangga dan dedikasi yang tinggi terhadap masyarakat Papua dan Pemerintah Daerah yang bahu membahu mensukseskan PON XX Papua 2021.

**“Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua atas penyelenggaraan PON XX yang sukses. Sejarah akan mencatat bahwa PON yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Bumi Cenderawasih, Tanah Papua berlangsung dengan sukses”.**

Selanjutnya, Wakil Presiden juga menyatakan bahwa PON kali ini adalah PON tersulit yang bisa diselenggarakan namun Provinsi Papua mampu melaksanakannya dengan sukses dan sempurna. Semboyan “TORANG BISA” bukan hanya sekedar semboyan namun nyata dan menjadi bukti bahwa Papua bukan hanya sejajar dengan Provinsi lain di Indonesia namun dalam beberapa aspek justru lebih unggul. Selain mengucapkan selamat kepada kontingen Provinsi Papua yang berhasil memperoleh 93 medali emas dan berhasil menduduki peringkat keempat serta membuktikan bahwa atlet Papua telah menjadi kekuatan elit olahraga nasional, tidak lupa, Wakil Presiden juga mengucapkan terimakasih kepada Provinsi Papua atas penyelenggaraan PON XX Papua 2021.

Penutupan PON XX Papua 2021 yang dilaksanakan, Jumat (15/10/21) malam adalah akhir dari seluruh rangkaian pesta olahraga nasional ini. Acara tersebut dilaksanakan dengan meriah di Stadion Lukas Enembe Kampung

“Saya harus katakan bahwa kalian semua luar biasa. Jauh sebelum penyelenggaraan, tidak sedikit orang diluar sana yang skeptis dan pesimis, apakah Papua mampu menjadi tuan rumah PON. Hari ini dapat kita buktikan bahwa Papua bisa, Torang bisa, Barang apa jadi”.

Gubernur Provinsi Papua,  
Lukas Enembe, S.IP, MH

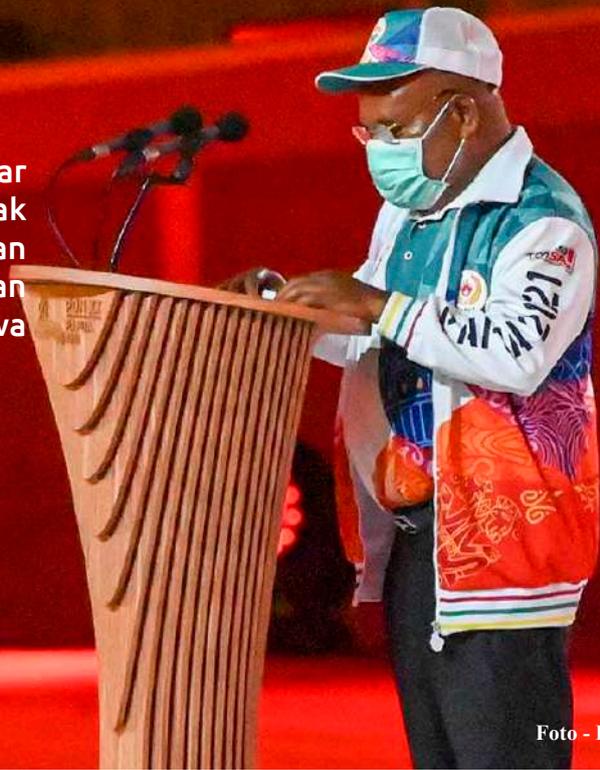


Foto - PB PON XX PAPUA

Gubernur Papua sekaligus Ketua Umum PB PON XX Papua 2021, Lukas Enembe, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh atlet yang telah bertanding dengan jiwa sportif dan integritas tinggi dalam setiap pertandingan serta mengucapkan selamat kepada kontingen Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil menjadi juara umum dalam ajang PON ini dan berharap agar Gubernur di seluruh Provinsi di Indonesia peduli dan memiliki visi yang besar bagi kemajuan olahraga dan kesejahteraan para atlet. Selain itu, Enembe juga mengungkapkan rasa bangganya dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia yang telah mampu melaksanakan ajang olahraga ini serta mampu mengatasi berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan PON XX Papua 2021. Tidak lupa juga, ucapan terimakasih diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri, Kapolri dan jajarannya, Panglima TNI dan jajarannya, Ketua KONI dan berbagai pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan PON di Provinsi Papua. Pada akhir sambutannya, Enembe menyatakan rasa bangga pada seluruh masyarakat Papua, “Saya harus katakan bahwa kalian semua luar biasa. Jauh sebelum penyelenggaraan, tidak sedikit orang diluar sana yang skeptis dan pesimis, apakah Papua mampu menjadi tuan rumah PON. Hari ini dapat kita buktikan bahwa Papua bisa, Torang bisa, Barang apa jadi”.

Acara penutupan PON XX Papua 2021 juga diwarnai kemeriahan kembang api serta penampilan dari artis ibukota, artis lokal Papua, dan grup tari lokal Papua. Berbagai penampilan tersebut pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang hadir pada acara penutupan tersebut. Akhirnya, diharapkan PON XX Papua 2021 dapat mengubah paradigma banyak orang, terutama saudara-saudara kita dari Provinsi lain yang baru pertama kali berkunjung di Provinsi Papua bahwa Papua bisa aman, damai, dan ber-NKRI. Selain itu, keindahan alam Papua yang masih asri, makanan dan minuman khas Papua, berbagai cinderamata khas Papua, dan terutama keramahan masyarakat Papua dapat menjadi cerita yang baik tentang Papua bagi seluruh masyarakat Indonesia. **PAPUA, TORANG BISA.**



**TORANG  
BISA!**

Maskot  
PON XX 2021  
Kangpho dan Drawa



# GEGAP GEMPITA PEPARNAS XVI PAPUA 2021 : PAPUA JUARA. BARANG APA JADI!

**Jayapura** - Tahun 2021 adalah sejarah baru bagi Provinsi Papua dibidang olahraga karena perhelatan pesta olahraga nasional di dilaksanakan di Provinsi Papua secara berturut-turut. Setelah sukses menyelenggarakan PON XX Papua 2021 pada bulan Oktober 2021, maka selanjutnya Provinsi Papua pun sukses menyelenggarakan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Papua 2021 pada 2-15 November 2021.



Foto - PB.PEPARNAS16PAPUA

Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) merupakan ajang kompetisi olahraga nasional yang menyerupai Pekan Olahraga Nasional (PON) dan diikuti oleh para atlet difabel perwakilan dari seluruh Provinsi di Indonesia. Perbedaan antara PON dan PEPARNAS adalah pembagian kelas dan teknis pertandingan sesuai dengan kondisi atlet. Pada PEPARNAS XVI Papua 2021 ini diikuti oleh 1.985 atlet dan 740 orang official perwakilan dari 33 Provinsi di Indonesia.

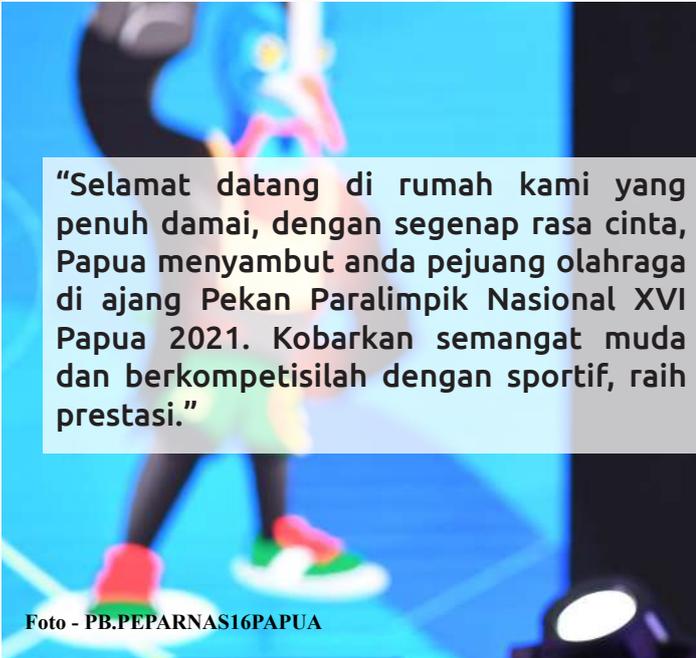
Terdapat 12 cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang ini, yakni Bulutangkis, Angkat Berat, Tenis Kursi Roda, Tenis Meja, Judo Tuna Netra, Sepak Bola CP, Menembak, Catur, Atletik, Boccia, Renang, dan Panahan. Berbagai cabang olahraga tersebut dipertandingkan pada beberapa venue pertandingan yang tersebar pada 2 (dua) klaster, yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Cabang olahraga yang dipertandingkan di Kota Jayapura, yaitu Bulutangkis,

Tenis Lapangan Kursi Roda, Judo Tunanetra, Sepak Bola CP, Catur, dan Boccia dengan menggunakan venue pertandingan di GOR Cenderawasih, Stadion Mahacandra Uncen, Lapangan Tenis Walikota Jayapura, GOR Trikora, Hotel Sahid, dan Auditorium Uncen. Sedangkan di Kabupaten Jayapura, yaitu Angkat Berat, Tenis Meja, Menembak, Panahan, Atletik dan Renang dengan menggunakan venue pertandingan di Hall Suni Garden Lake Hotel, Istora Papua Bangkit Kampung Harapan, Arena Panahan Kampung Harapan, Arena Menembak Kampung Harapan, Gedung Akuatik dan Stadion Lukas Enembe.

Pembukaan PEPARNAS XVI Papua 2021 dilaksanakan, Jumat (5/11/2021) malam di Stadion Mandala Jayapura. Konsistensi antusias masyarakat menjadikan acara pembukaan tersebut tidak kalah meriah dan luar biasa jika dibandingkan dengan acara pembukaan PON XX Papua 2021. Dengan mengusung Motto "Sehati Mencapai Tujuan

Ciptakan Prestasi" dan Jargon "Papua Juara, Barang Apa Jadi", serta Tema "Cahaya Kemenangan Dari Timur Papua", Pembukaan PEPARNAS XVI Papua 2021 bermandikan cahaya gemerlap dan semangat meraih kemenangan yang diwujudkan dalam bentuk visual berisikan budaya, eksotika alam, masyarakat, dan kalimat penggugah motivasi.

Presiden RI, Joko Widodo, dalam pidato singkatnya yang disampaikan secara virtual pada acara pembukaan tersebut, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua atas ketidakhadirannya secara langsung karena sedang menjalani karantina sepuluh hari dari luar negeri. Tidak lupa, Presiden mengucapkan terimakasih kepada Wakil Presiden RI, Ma'aruf Amin, karena telah bersedia hadir untuk membuka PEPARNAS XVI Papua 2021. Lebih jauh, Presiden mengatakan, "Saya yakin PEPARNAS di Papua akan sukses, penuh dengan prestasi, dan meriah. TORANG BISA".



“Selamat datang di rumah kami yang penuh damai, dengan segenap rasa cinta, Papua menyambut anda pejuang olahraga di ajang Pekan Paralimpik Nasional XVI Papua 2021. Kobarkan semangat muda dan berkompetisilah dengan sportif, raih prestasi.”

Foto - PB.PEPARNAS16PAPUA



Gubernur Provinsi Papua,  
Lukas Enembe, S.IP, MH

Senny Marbun, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia (NPCI), dalam sambutannya pada acara ini mengatakan bahwa di era kepemimpinan Joko Widodo telah memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada seluruh masyarakat yang tergabung di NPCI untuk mensejajarkan harkat dan martabatnya dengan saudara-saudara yang non difabel. “Sekarang saatnya bagi kita, terbuka kesempatan lebar-lebar untuk melatih diri, disiplin diri, mengejar prestasi maksimal guna mengharumkan nama bangsa dan negara”, ujar Marbun.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua sekaligus Ketua Umum PEPARNAS XVI Papua 2021, menyampaikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta, “Selamat datang di rumah kami yang penuh damai, dengan segenap rasa cinta, Papua menyambut anda pejuang olahraga di ajang Pekan Paralimpik Nasional XVI Papua 2021. Kobarkan semangat muda dan berkompetisilah dengan sportif, raih prestasi. Kalian adalah bukti nyata bahwa disabilitas bukan halangan. Kalian adalah wakil terbaik dari Provinsi masing-masing. Dengan

segala kerendahan hati, Papua bangga bisa menyambut seluruh kontingen di Pekan Paralimpik Nasional pertama di Tanah Papua. Selamat bertanding dan tetap jaga protokol Kesehatan. Kitorang bisa. Barang apa jadi”.

PEPARNAS XVI Papua 2021 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Wakil Presiden meyakini bahwa ajang olahraga nasional ini akan sukses karena masyarakat Papua adalah pecinta olahraga dan juga tuan rumah yang hangat. Lebih jauh, Wakil Presiden mengatakan bahwa “Sukses ini sekali lagi akan dicatat dalam sejarah yang akan dikenang dalam hati seluruh rakyat Indonesia. PEPARNAS adalah ajang yang sangat istimewa, ajang untuk mendobrak batas diri dan keluar sebagai pemenang. PEPARNAS juga bukan hanya kompetisi olahraga tapi lebih dari itu, adalah pembuktian adanya semangat kesetaraan dan persamaan bagi kita semua”.

Bendera PEPARNAS dibawa oleh 6 (enam) orang atlet difabel berprestasi asal Papua, yaitu Budiman S. Yowey (cabang olahraga renang), Amon Asso (cabang olahraga atletik), Agnes Yowei (cabang olahraga

renang), Hana Resty (cabang olahraga tenis meja), Laurens Siep (cabang olahraga atletik), dan Zeth K. Baransano (cabang olahraga atletik). Kemudian bendera tersebut diserahkan pada Purna Paskibra Indonesia untuk dikibarkan. Selain itu, acara pembukaan ini semakin semarak dan membawa suasana haru karena selain didukung oleh penampilan dari artis-artis Indonesia, juga didukung oleh para penyanyi difabel yang memiliki suara emas nan merdu.

Terdapat total 1.650 medali yang diperoleh oleh semua kontingen pada PEPARNAS XVI Papua 2021. Provinsi Papua berhasil meraih peringkat pertama sekaligus juara umum dengan perolehan medali sebanyak 305 medali, yang terdiri dari medali emas sebanyak 127 medali, medali perak sebanyak 86 medali, dan medali perunggu sebanyak 92 medali. Peringkat kedua diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan perolehan medali sebanyak 277 medali, dan peringkat ketiga diraih oleh Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan medali sebanyak 225 medali.

Penutupan PEPARNAS XVI Papua 2021 digelar pada, Sabtu (13/11/2021) di Stadion Mandala Jayapura dan ditutup secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, "Penyelenggaraan PON dan PEPARNAS luar biasa". Dukungan delegasi semua Provinsi luar biasa dan saya lihat spotifitas dan prestasi para atlet juga luar

jauh, Enembe mengatakan "Dari mereka kita bisa belajar selalu mensyukuri karunia Tuhan sehingga posisi kita sama dengan teman-teman difabel karena menunjukkan asas kesetaraan harus diperjuangkan". Selain itu, Enembe juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas olahraga yang telah dibangun dengan megah secara baik dan maksimal.

Penurunan bendera PEPARNAS oleh atlet Papua



Presiden Republik Indonesia,  
Ir. H. Joko Widodo

Foto - PB.PEPARNAS16PAPUA

biasa. Secara khusus, saya juga menyampaikan selamat kepada Provinsi Papua atas semua prestasinya dan selamat kepada Papua yang telah sukses menjadi tuan rumah PON dan PEPARNAS". Lebih jauh, Presiden mengatakan bahwa melalui PON dan PEPARNAS di Papua menunjukkan kebangkitan besar olahraga nasional yang disertai dengan keberagaman dan menghormati kesetaraan sehingga dapat meraih prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan negara.

Gubernur Papua sekaligus Ketua Umum PEPARNAS XVI Papua 2021 pada kesempatan yang sama memberikan apresiasi kepada para atlet dari Provinsi Papua yang telah menjaga sportivitas. Provinsi Papua berhasil menjadi juara umum merupakan bukti bahwa "Kitorang Bisa" bukan hanya slogan tapi telah menjadi bukti nyata. Lebih

menandai berakhirnya PEPARNAS XVI Papua 2021. Kemudian bendera diserahkan kepada perwakilan atlet dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara karena kedua Provinsi tersebut akan menjadi tuan rumah pada ajang PEPARNAS XVII empat tahun mendatang, Acara penutupan tersebut juga dimeriahkan dengan tarian nusantara persembahan dari anak-anak Papua sebagai simbol terjalannya kebersamaan para kontingen dari 33 Provinsi sejak berlangsungnya PEPARNAS XVI Papua 2021.

# PELAKSANAAN MUSRENBANGDA PROVINSI PAPUA 2021 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

**Jayapura** - Bappeda Provinsi Papua telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Papua pada 20–21 April 2021, bertempat di Swisbell Hotel Jayapura. Tujuan dari dilaksanakannya Musrenbangda ini adalah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi target-target capaian tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang nantinya akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bahan usulan Pemerintah Provinsi Papua dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Musrenbangda Provinsi Papua Tahun 2021 dibuka secara resmi pada Selasa, 20/04/21, oleh Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy, mewakili Gubernur Papua. Dalam sambutannya, Flassy menyampaikan bahwa banyak regulasi baru yang harus dipedomani dalam penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2022, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mengamanatkan bahwa seluruh penyusunan dokumen perencanaan wajib menggunakan SIPD. Selanjutnya, Flassy berpesan agar forum strategis ini mampu dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan maupun solusi untuk menjawab isu strategis pembangunan daerah. Pada akhir sambutannya, Flassy mengajak seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Papua untuk selalu optimis dalam upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dan berkeadilan, mempersiapkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia sebagai modal dasar untuk maju dan berdaya saing, serta penerapan prinsip-prinsip keseimbangan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula secara virtual Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang dalam arahannya berpesan agar perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua harus mengacu pada visi dan misi Presiden. “Harapannya, perencanaan yang dibuat oleh Provinsi, Kabupaten/Kota harus mengakomodir elemen pemerintah lainnya, seperti DPRP, MRP, dan juga tokoh masyarakat sehingga terjadi kolaborasi dan seluruh usulan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan kedepan”, lanjut Karnavian.

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa tujuan Musrenbangda ini untuk menyamakan persepsi antara Kabupaten/Kota dan Provinsi. “Penyusunan yang kita lakukan nantinya secara berjenjang, mengacu kepada program APBN atau RPJM Pusat dan kemudian Provinsi serta Kabupaten/Kota. Jadi, selama dua hari ini, kami fokus membahas usulan dari Kabupaten/Kota yang nantinya disampaikan ke Pusat”, ujar Walilo.

Kegiatan pembahasan pada Musrenbangda diikuti oleh peserta dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Adapun mekanisme yang digunakan dalam pembahasan adalah 29 Kabupaten/Kota tersebut dikelompokkan berdasarkan wilayah adat, yaitu wilayah adat Ha Anim, Mee Pago, Lapago, Saireri, dan Mamta. Hasil kesepakatan dari pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari 29 Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Provinsi Papua, dan Sekretaris Daerah Papua. Kegiatan Musrenbangda berakhir pada Rabu, 21 April 2021, dan ditutup oleh Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy.



Kepala Bappeda Provinsi Papua,  
**Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si**

Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

## SATU DATA INDONESIA DI PROVINSI PAPUA

**Jayapura** - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan kebijakan terkait tata Kelola data Pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Perpres ini menjelaskan bahwa data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Selain itu, guna mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data serta mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung Perpres Nomor 39 Tahun 2019, maka telah dilaksanakan Kegiatan Workshop Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Papua pada Kamis (01/07/2021) yang bertempat di Swisbell Hotel Jayapura. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, yang dalam sambutannya mengatakan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata Kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Hal ini tentunya sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada kesempatan yang sama, Walilo menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya data dalam proses perencanaan pembangunan Provinsi Papua, "Setiap perencanaan pembangunan harus berbasis data dan informasi yang dibangun dalam satu sistem yang disebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Untuk itu, Satu Data Indonesia di Provinsi Papua, data yang up to date dan berkualitas merupakan keharusan". Lebih jauh Walilo mengatakan bahwa kedepannya data dibutuhkan untuk menjawab tantangan implementasi pembangunan bagi Orang Asli Papua, dalam kerangka kebijakan afirmatif melalui Otonomi Khusus yang jauh lebih baik dari sisi pengendalian. Data dari kampung perlu tersedia secara valid dan berkualitas sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Orang Asli Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur dasar. Kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) hari ini juga menghadirkan narasumber dari Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian BPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Pusat Data dan Analisa Pembangunan Bappeda Provinsi Papua, dan Kompak.

Masih terkait dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Papua, belum lama ini telah dilaksanakan pula Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Papua. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (11/11/2021), bertempat di Hotel Aston Jayapura.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

Ketua Panitia Pelaksana, Merlina Hamadi, dalam laporannya mengharapkan agar melalui kegiatan ini maka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dapat tersosialisasikan kepada Kepala Instansi Provinsi dan Kepala Instansi Kabupaten/Kota. Implementasi Forum Satu Data Indonesia di Provinsi Papua yang disebut dengan Papua Integrasi Satu Data (PAITUA) dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan koordinasi dan komunikasi sehingga tercipta kesepahaman untuk mengintegrasikan data antar instansi sektoral guna membangun Satu Data Indonesia di Provinsi Papua. Selain itu, sekaligus juga tersosialisasikannya Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) yang merupakan tools penyedia data dari kampung kepada instansi sektoral di tingkat Provinsi dalam kegiatan ini.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Musa'ad, mewakili Gubernur Papua untuk membuka kegiatan ini, dalam sambutannya mengatakan bahwa penguatan tata kelola Pemerintahan yang baik harus berbasis data atau bukti dan penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu dari misi Gubernur Papua. Faktor utama yang mendorong dan mempercepat terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik adalah dengan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sehingga dapat menjamin terciptanya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tentang pentingnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia untuk memenuhi kebutuhan data berkualitas sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Lebih jauh Musa'ad mengatakan bahwa Kegiatan Workshop Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Papua yang telah dilaksanakan sebelumnya merupakan tahap awal dan bukti keseriusan dari Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung ketersediaan data yang merupakan elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Papua. Selanjutnya, maka akan dibentuk PAITUA yang didasari dengan Peraturan Gubernur yang regulasinya sementara dalam proses finalisasi. Adapun PAITUA merupakan portal yang memuat data-data pembangunan, yang terdiri dari data geospasial dan data spasial ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan untuk mewadahnya maka dibentuk Forum Satu Data sebagai sarana komunikasi dan koordinasi bagi Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung. Diharapkan melalui forum ini maka dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat berperan juga dalam mewujudkan implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua karena ketersediaan data yang akurat dan akuntabel sangat penting dalam penentuan pemanfaatan pembagian penerimaan khusus dalam rangka Otonomi Khusus, seperti data jumlah Orang Asli Papua, jumlah penduduk, tingkat capaian pembangunan, dan indikator lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menekankan bahwa Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Papua dapat berperan dalam percepatan pembangunan berbasis kontekstual Papua karena dapat membantu dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan serta dasar dalam pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Otonomi Khusus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui transformasi ekonomi berbasis wilayah adat serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, inovatif, dan berkarakter. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Papua ini dihadiri oleh instansi terkait di Provinsi Papua dan perwakilan dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang pada akhirnya menghasilkan 3 (tiga) kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, yaitu membentuk Forum Data di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, fasilitasi Pemerintah Provinsi Papua melalui Bappeda Provinsi Papua terhadap pembentukan Forum Data di Kabupaten/Kota, dan Dukungan/Kontibusi dari Mitra Pembangunan sesuai dengan arah program dari masing-masing Mitra Pembangunan.

## SISTEM INOVASI DAERAH : LANDASAN KINERJA PEMBANGUNAN BERBASIS INOVASI



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

**Jayapura** - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyatakan bahwa keberhasilan negara maju menumbuhkembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena negara tersebut mampu mensinergikan perkembangan kelembagaan dan sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara sistematis. Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa diperlukan perhatian terhadap peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih jauh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga menyatakan bahwa upaya untuk memajukan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan tanggungjawab negara. Pada tingkat daerah, diperlukan adanya kebijakan strategis terkait pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan keseluruhan proses menumbuhkembangkan inovasi dalam 1 (satu) sistem yang dilakukan antar institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi

serta inovasi maka diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah perlu merespon berbagai regulasi tersebut dengan cara membangun dan memperkuat SIDa sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penguatan daya saing daerah dan percepatan pembangunan di segala aspek kehidupan yang pelaksanaannya selaras dengan RPJMD dan RKPD di setiap tahunnya. Sebagai tindak lanjut maka mekanisme pembentukan SIDa diawali dengan dibentuknya kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri Tim Koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Tim Kerja yang bisa terdiri dari beberapa Kelompok Kerja (OPD/PT/Lembaga lainnya), yang disesuaikan dengan tema atau klaster yang menjadi unggulan daerah. Adapun tujuan dari pembentukan SIDa adalah agar tercipta kolaborasi atau sinergitas dari pihak Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan berbagai komponen lainnya, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perlunya tindakan perbaikan sampai pada penguatan daya saing daerah.

Adapun kebijakan yang harus dilaksanakan dalam pembentukan SIDa adalah kebijakan umum, program percepatan pembangunan, Rencana Aksi Daerah yang ada dalam Roadmap penguatan SIDa itu sendiri, RPJMD, dan RKPD.

Peran dari Tim Koordinasi untuk mengintegrasikan antara Rencana Aksi Daerah dalam penguatan SIDA dengan dokumen RKPD di setiap tahunnya. Terkait pelaksanaan pembentukan SIDA, kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat disesuaikan dengan peran yang diembannya, serta sebaiknya juga disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, tema yang diangkat, dan berdasarkan hasil kajian ilmiah.

Saat ini, terkait pelaksanaan SIDA di Provinsi Papua masih pada tahap sosialisasi dan rencana pembentukan SIDA yang akan ditindaklanjuti di Tahun Anggaran 2022. Masih terdapat beberapa kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya sumberdaya manusia peneliti dalam struktur kelitbangan daerah, beberapa kali terjadi pergantian struktur organisasi kelitbangan di daerah, tidak adanya fungsi kelitbangan di beberapa Kabupaten/Kota, kurang optimalnya pendanaan bidang penelitian dan pengembangan, serta masih

kurangnya koordinasi antara instansi di lingkup Pemerintah Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, antara lain dengan membuka formasi tenaga fungsional peneliti, mengingat pentingnya kelitbangan di daerah maka sebaiknya fungsi kelitbangan tetap dipertahankan dan perlu penguatan kapasitas yang optimal, diperlukan alokasi penelitian yang lebih dari cukup guna mendukung semua kebijakan pimpinan daerah dan sebaiknya berdasarkan hasil kajian ilmiah, serta perlunya kolaborasi dan sinergitas antar instansi dan stakeholders lainnya terkait dengan penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

# INPRES 9 TAHUN 2020 : HARAPAN BARU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN PROVINSI PAPUA



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

**Jayapura** - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres tersebut mengamanatkan untuk menetapkan desain baru dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam semangat transformasi Otonomi Khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua yang difokuskan pada 5 (lima) kerangka baru untuk Papua (The New Framework for Papua). Adapun 5 (lima) kerangka tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan sumberdaya manusia; percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi; percepatan pembangunan infrastruktur dasar; peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon; serta percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik dan antusias serta akan mengawal seluruh tahapan proses implementasinya. Beberapa langkah konkret

diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menyikapi Inpres Nomor 9 Tahun 2020, antara lain dengan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini berkonsultasi dengan Bappenas selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; membentuk Sekretariat Bersama Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua yang bertugas mengawal seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020; melakukan sosialisasi Inpres 9 Tahun 2020 kepada seluruh instansi terkait di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota; melakukan audiensi dengan Deputi Kantor Staf Kepresidenan, Deputi II Kantor SETWAPRES dan Bappenas Republik Indonesia untuk memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 berjalan sesuai dengan harapan; menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua; serta melakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) di masing-masing wilayah adat guna Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Penyusunan Dokumen RIPP (Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua).

Setelah dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) di beberapa wilayah adat, dapat terlihat bahwa respon Pemerintah Kabupaten/Kota sangat tinggi dan berharap Inpres 9 Tahun 2020 dapat menjadi terobosan dan langkah konkret untuk memecahkan isu-isu strategis daerah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun masalah tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup. Inpres 9 tahun 2020 pun mengamanatkan agar Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan

di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2024 dan penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunannya. Terkait dengan itu, Bappeda Provinsi Papua telah mengambil langkah-langkah, antara lain melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2024 sebagai baseline penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua; memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun

2020 kepada instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua, dan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di masing-masing wilayah adat untuk menyatukan pemahaman serta menjaring isu-isu strategis dari setiap wilayah adat maupun masing-masing Kabupaten/ Kota sebagai bahan masukan atau acuan penetapan arah dan kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua



Foto - Dok Bappeda Prov. Papua





Foto - Dok Bappeda Prov. Papua

## PELAKSANAAN MONITORING : MENJAGA KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kabid Pengendalian & Evaluasi,  
**Verra A.P. Wanda, ST, M.Si**

**Jayapura** - Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi Papua, Verra Wanda, dalam satu kesempatan wawancara pada awal November 2021 menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bappeda sebagai pengendali program dan kegiatan yang langsung diperintahkan oleh Gubernur. "Gubernur dapat melakukan monitoring melalui Bappeda dengan melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif) untuk melihat secara langsung serta memberi masukan dan perbaikan sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, monitoring kolaborasi yang juga melibatkan Akademisi, Inspektorat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat", lanjutnya.

Tujuan dari dilaksanakannya monitoring adalah untuk mengkaji kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dari suatu kegiatan, mengidentifikasi masalah yang timbul sehingga dapat langsung diatasi, melakukan penilaian terkait ketepatan pola dan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan, mengetahui keterkaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan atau tujuan yang disederhanakan untuk mendapat umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dan untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Lebih jauh, Wanda menjelaskan bahwa, "Pada saat monitoring, ada 3 (tiga) komponen yang jadi pemantauan, yaitu memantau perkembangan realisasi penyerapan dana, memantau realisasi pencapaian target

keluaran (output), dan juga memantau kendala yang dihadapi dan tindak lanjutnya".

Mekanisme pelaksanaan monitoring dimulai dari pelaksanaan rencana sampai dengan administrasi dan selanjutnya hasil monitoring secara berjenjang dilaporkan pada penanggungjawab program. Aktivitas monitoring dilaksanakan guna menggali lebih dalam data dan informasi yang berkaitan dengan analisa ketercapaian kinerja program jika dibandingkan dengan rencana program serta identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan program. Adapun Langkah-langkah dalam melaksanakan monitoring, yaitu penentuan tujuan, penentuan target atau kelompok sasaran, penentuan perencanaan kerja, penentuan kriteria monitoring dan evaluasi yang dipakai, pengumpulan data, analisa data dan penulisan kesimpulan serta rekomendasi.

Sebelum dilaksanakannya monitoring maka terlebih dahulu perlu dilakukan beberapa persiapan, terutama terkait administrasi, seperti membuat Term of Reference (ToR) sebagai kerangka acuan kegiatan, mempersiapkan tim, mempersiapkan surat pemberitahuan dan juga jadwal kegiatan. Sementara itu, untuk pelaksanaan monitoring meliputi pembahasan meja dan turun lapangan yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan monitoring. "Idealnya, monitoring dilakukan oleh petugas yang memahami konsep tentang maksud dan tujuan monitoring, yang dapat memahami teori dengan baik, mengetahui proses serta pengalaman dalam melaksanakan monitoring agar hasilnya sah dan handal", jelas Wanda.

Terkait waktu pelaksanaan monitoring, Bappeda Provinsi Papua melaksanakannya secara kontinu dan berkelanjutan agar tidak kehilangan momen yang terjadi. Wanda menjelaskan bahwa, “Selama ini pelaksanaan monitoring meja dan monitoring lapangan dilakukan sesuai dengan rencana, yaitu 2 (dua) kali dalam setahun, namun sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dengan rencana, maka monitoring meja sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan sudah dilaksanakan untuk semester pertama pada bulan Juni 2021 serta untuk semester kedua pada bulan November 2021 dengan progress sementara telah mencapai 100 persen karena untuk semester kedua telah terlaksana dengan baik. Sementara itu, untuk monitoring lapangan direncanakan pelaksanaannya pun 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2021. Sedangkan tahap kedua rencananya akan dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Desember 2021. Progresnya sejauh ini telah mencapai 75 persen karena tinggal pelaksanaannya saja”.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring lapangan saat ini adalah keterbatasan dana sehingga tim tidak dapat melihat secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di hampir 29 Kabupaten/Kota, beberapa daerah yang keadaan keamanannya belum kondusif, pendampingan PPTK kegiatan SKPD pelaksana kegiatan, pandemi Covid-19 yang terjadi 2 (dua) tahun belakangan ini, data turun lapangan yang kurang valid, serta pemahaman dari tim dalam pelaksanaan monitoring.

Pada bagian akhir dari sesi wawancara ini, tidak lupa Wanda menjelaskan tentang manfaat dari pelaksanaan monitoring, yaitu membantu dalam penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya, sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya, membantu untuk mempersiapkan laporan dalam waktu yang singkat, mengetahui berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja yang sudah baik, serta sebagai dasar informasi yang penting untuk melakukan evaluasi kegiatan.



# SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2021



**Pembahasan Pedoman Rencana Kerja Anggaran tahun 2022**



**Asistensi Musrenbangda Kabupaten**



**Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pengelola Dana Otsus Prov. Papua**



**Musrenbangda Provinsi Papua**

# SERBA - SERBI KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA 2021



**Monitoring Meja dalam rangka pengendalian pelaksanaan program & kegiatan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021**



**Pelatihan Indeks Penginputan Inovasi Daerah**



**Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem**



**Pembahasan Teknis Usulan Dana Tambahan Infrastruktur Otsus Prov. Papua**





## PEMERINTAH PROVINSI PAPUA



**PUSDALISBANG**  
**BAPPEDA** PROVINSI PAPUA  
Sie. Pelayanan informasi & Komunikasi